

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Financial report yang memiliki keandalan dan relevan dalam penyusunannya sangat memiliki peran penting bagi manajemen. Saat perusahaan dalam keadaan yang tidak baik manajemen akan berusaha menjadikan kinerja perusahaan seakan-akan dalam keadaan sehat yaitu dengan melakukan praktek manipulasi pada sejumlah angka tertentu pada *financial report*. Hal tersebut dilakukan untuk dapat menambah ketertarikan investor agar mau menginvestasikan dananya pada perusahaan dan agar tetap dapat dipercaya para investor. Salah satu penyimpangan yang ada pada *financial report* yaitu merekayasa penyajian tingkat laba pada *financial report* lebih dikenal dengan *earning management* (manajemen laba) (Herawaty, 2008).

Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai perilaku para manajer saat proses penyusunan *financial report* suatu perusahaan untuk dapat memberikan pengaruh pada tingkat laba yang disajikan. Menurut *theory agency*, praktik manajemen laba dapat terjadi karena adanya keterikatan perjanjian melalui penandatanganan kontrak antara *agent* (manajemen) dengan *principal* (pemilik perusahaan). Masalah keagenan timbul karena adanya perbedaan keinginan antara manajemen yang menginginkan laba yang tinggi untuk mewujudkan suasana kerja yang kondusif sedangkan pemegang saham berkeinginan untuk memperoleh laba yang tinggi untuk dirinya sendiri. Konflik keagenan dan asimetri informasi yang

sedang berlangsung para agen dan prinsipal menjadikan penyajian informasi yang disusun para agen adalah bukan informasi yang sesungguhnya khususnya terkait penilaian kinerja para agen. Asimetri informasi ini menunjukkan adanya peluang bagi agen untuk mempraktikkan manajemen laba. (Taco dan ilat, 2016).

Manajemen laba dapat berdampak negatif terhadap perusahaan karena akan menyebabkan hilangnya investor yang telah berinvestasi banyak pada perusahaan tersebut dan adanya kemungkinan kebangkrutan jika diajak kreditur ataupun investor yang dapat membantu dana operasional perusahaan. Perusahaan dikelola oleh manajemen yang memiliki banyak pengetahuan yang banyak, valid, dan cepat dari pada pemilik perusahaan yang menjadikan manajemen berpotensi besar untuk melakukan manipulasi laba. Manajemen dalam mengelola peluang untuk mempraktikkan laba tidak selamanya diartikan sebagai proses rekayasa pada *financial report* perusahaan dikarenakan adanya sejumlah metode yang dapat dipergunakan dan tidak ada larangan atas hal itu (Kusumawardhani, 2012).

Klasifikasi manajemen laba terdiri dari dua macam yaitu 1) manajemen laba riil dilakukan dengan merekayasa keseharian aktivitas perusahaan pada suatu periode akuntansi, dan 2) manajemen laba akrual lakukan dengan *discretionary accrual* (Roychowdhury, 2006). Manajemen laba riil bisa dipraktikkan oleh para manajer sewaktu-waktu selama periode berjalan. Hal tersebut menjadikan manajemen laba riil lebih banyak dilakukan oleh para manajer dari pada manajemen laba akrual. Hal tersebut karena kegiatan manajemen laba riil memiliki tingkat kesulitan yang tinggi untuk dapat dibedakan dari pada laba yang biasanya.

Tindakan manajemen laba riil menunjukkan kinerja perusahaan jangka pendek yang lebih baik dapat mengurangi nilai perusahaan untuk jangka waktu yang lama. Hal itu karena adanya perilaku manajemen yang menambah perolehan laba pada periode saat ini tetapi akan berdampak negatif pada periode selanjutnya (Roychowdhury, 2006). Contohnya, pembelian diskon besar-besaran kepada pelanggan pada akhir tahun untuk jumlah barang yang dijual dan memperoleh tujuan jangka pendek yang menimbulkan dampak bagi konsumen untuk lebih mengharapkan diskon yang sama pada periode mendatang. Hal tersebut memberikan gambaran adanya margin yang cukup rendah pada hasil penjualan di periode berikutnya.

Gagalnya penerapan *corporate governance* oleh perusahaan dapat ditunjukkan dengan adanya sejumlah kasus di Indonesia. Contohnya, PT. Kimia Farma Tbk. Kementerian BUMN dan BAPEPAM menilai laporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk mengandung unsur rekayasa dimana PT. Kimia Farma Tbk melakukan penggelembungan harga persediaan dan pencatatan ganda atas penjualan (Ulya dan Khoirunnisa, 2015). Kecurangan lain juga terjadi pada PT. Katarina Utama Tbk, dan PT. KAI. Kasus PT. Katarina Utama Tbk. yang sebelum dan setelah IPO mempraktikkan *earning management*. BEI juga pernah dikelabui dengan lolosnya IPO PT. Katarina Utama Tbk dengan dana masyarakat yang dihimpun sebesar berpuluh-puluh miliar, namun dana yang telah dikumpulkan tersebut dipergunakan untuk direksi saja. Kasus selanjutnya terjadi pada PT. KAI melalui adanya perbedaan perspektif antara komisaris dan manajemen, terutama jabatan rangkap komisaris yang juga selaku ketua komite audit, dimana komisaris

melakukan penolakan dan tidak mau memberikan tanda tangan pada *financial report* yang telah diaudit dan komisaris menginginkan agar dilakukan audit ulang pada penyusunan *financial report* dengan sesuai fakta yang ada dan transparan. Kasus di PT. KAI yaitu diindikasikan adanya pola *Income Maximization* untuk melakukan manajemen laba pada *financial report* PT. KAI di periode 2005.

Penelitian ini mempergunakan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2017. Alasannya, adanya keterkaitan antara BUMN dengan GCG yang mengacu pada SK Kep-117/M-MBU/2002. Pada peraturan tersebut dijelaskan jika penerapan GCG pada perusahaan BUMN dan publik menjadi sorotan utama khususnya pada program privatisasi BUMN yang menjadi tumpuan harapan bagi perusahaan publik yang lain dan berkontribusi secara finansial pada anggaran negara dan nilai tambah yang bersaing bagi stakeholder dan perusahaan (Hayati dan Gusnardi, 2012)

Memonitor suatu perusahaan dalam masalah kontrak dan untuk membatasi perilaku oportunistik manajemen dapat dilakukan dengan cara tatakelola perusahaan pada *corporate governance*. Untuk dapat memotivasi efisiensi pada pasar maka perusahaan memerlukan tata kelola perusahaan yang baik (*GCG-Good Corporate Governance*). Pada penerapannya, GCG ditopang oleh 3 pilar utama, yaitu pelaku pasar (perusahaan), pengguna produk/jasa (masyarakat), dan regulator (negara dan perangkatnya). Penerapan GCG juga memerlukan kontribusi dewan komisaris sebagai pengawas internal, di mana dewan komisaris ini dibantu oleh komite audit agar lebih efisien dari sisi penggunaan waktu dan juga dibantu dengan keahlian setiap direktur perusahaan. Diharapkan peran komite audit yang

semakin besar maka dapat meningkatkan fungsi pengawasan komite audit terhadap manajemen. Besarnya komite audit dapat menjadi akses pada sumber daya yang lebih besar sehingga dapat memunculkan efektivitas pengawasan yang lebih baik (Kusumaningtyas, 2014). Sangat pentingnya peran komite audit ini menjadikan jabatan ini harus dimiliki oleh individu yang memiliki kompetensi pada bidang *monitoring*, *accounting*, dan *financial* perusahaan (Dwiharyadi, 2017).

Corporate governance dapat diawasi oleh komite audit karena komite audit memiliki peran sebagai pengawas dapat mengurangi tindakan manajemen laba. Penelitian Yogi Darmayanti (2016) mengemukakan jika manajemen laba dipengaruhi oleh komite audit secara positif. Hal tersebut terjadi dikarenakan tindakan manajemen laba tidak dapat ditekan oleh ukuran komite audit yang besar bila anggotanya dipilih tanpa memerhatikan kompetensi yang memadai. Akan tetapi, lebih didasarkan pada hubungan dekat dengan dewan komisaris perusahaan. Hal tersebut menjadikan tidak profesionalnya kinerja komite audit yang menjadikan komite audit tidak mampu untuk mengurangi praktik manajemen laba pada perusahaan. Penelitian Taco dan Ilat (2016) juga mengemukakan hal yang sama yaitu manajemen laba dipengaruhi oleh komite audit secara positif. Pembentukan komite audit hanya sekedar formalitas belaka karena hanya untuk memenuhi peraturan pemerintah yang berlaku. Para anggota panitia audit tidak aktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang menjadikan pengawasan yang dilakukan tidak berlangsung secara efektif. Penelitian Nabila dan Daljono (2017), Meiranto dan Prastiti (2013) serta

Anggraini dan Hadiprayitno (2013) mengemukakan jika manajemen laba dipengaruhi oleh audit secara negatif. Tindakan manajemen dapat dikurangi dengan ukuran komite audit yang berukuran besar dan sebaliknya tindakan manajemen dapat bertambah dengan ukuran komite audit yang berukuran kecil.

Dewan komisaris memiliki fungsi untuk mengawasi strategi dan pengelolaan perusahaan. Dewan komisaris adalah hal yang utama dari GCG dan sering dianggap menjadi sistem kendali internal tertinggi yang bertugas untuk mengawasi tindakan para manajernya. Proporsi jumlah dewan komisaris yang semakin besar maka sangat dimungkinkan dapat optimal dalam mengurangi manajemen laba (Barus dan Setiawati, 2015). Penelitian Mabruah *et al* (2017) mengemukakan jika manajemen laba yang dapat dipengaruhi oleh ukuran dewan komisaris secara negatif. Hal tersebut mengindikasikan jika jumlah dewan komisaris yang semakin sedikit maka akan meningkatkan potensi manajemen laba. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Prastiti dan Meiranto (2013) tetapi tidak sejalan dengan penelitian Mahiswari dan Nugroho (2014) serta Kristiani *et al* (2014) yang mengemukakan Jika manajemen laba dipengaruhi oleh ukuran dewan komisaris secara positif. Besarnya ukuran dewan komisaris akan memperbesar tindakan manajemen laba. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa jumlah anggota dewan komisaris yang banyak tidak dapat bekerja secara efektif dalam meminimalkan praktik manajemen laba.

Penelitian ini adalah replika penelitian Dwiharyadi (2017). Perbedaan penelitian ini dan sebelumnya yaitu pada tahun. Penelitian sebelumnya hanya tahun 2013 dan 2014 sedangkan pada penelitian ini yaitu tahun 2013-2017. Selain

itu sampel dari penelitian sebelumnya juga berbeda yaitu perusahaan keuangan dan bank sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel BUMN non keuangan. Dengan adanya perbedaan tersebut diharapkan penelitian ini dapat mengurangi dan meminimalkan tindakan manajemen laba pada perusahaan. Berdasarkan uraian tentang manajemen laba diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Riil pada Perusahaan BUMN Non Keuangan di Indonesia**

1.2 Rumusan Masalah

Corporate Governance memiliki fungsi untuk meminimalkan permasalahan yang terjadi pada perusahaan agar Manajemen Perusahaan dapat bertindak transparan, efisien, dan efektif. *Corporate governance* yang efektif akan menciptakan perusahaan dan dapat meningkatkan laporan keuangan yang lebih berkualitas untuk menarik perhatian para investor agar mau menginvestasikan dana yang dimilikinya pada perusahaan. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari latar belakang masalah adalah:

1. Apakah ukuran komite audit memberikan pengaruh negatif pada manajemen laba riil ?
2. Apakah ukuran dewan komisaris memberikan pengaruh negatif pada manajemen laba riil ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh – pengaruh :

1. Pengaruh negatif ukuran komite audit pada manajemen laba riil.

2. Pengaruh negatif ukuran dewan komisaris pada manajemen laba riil.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoretis

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang *corporate governance* yang mempengaruhi manajemen laba riil pada perusahaan BUMN non keuangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu dan dapat mengaplikasikan ilmu yang dikaji ini terutama pada dunia kerja. Selain itu, penelitian ini juga satu dari beberapa syarat untuk menyelesaikan studi.

- b. Bagi Perusahaan

Memberikan saran agar lebih cermat dalam mengamati perilaku manajemen saat mempraktikkan manajemen laba riil terkait dengan ukuran komite audit dan ukuran dewan komisaris .

- c. Bagi Investor

Sebagai bahan pertimbangan sebelum berinvestasi terutama pada perusahaan yang tidak mempraktikkan *earning management*